

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA



**BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan, Basarnas memiliki tugas menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; memberikan pedoman dan pengarah dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Basarnas telah melaksanakan amanat Capaian Kinerja terkait Manajemen Kinerja ASN dan Transformasi SKP sesuai dengan Peraturan Menteri Menpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai untuk pegawai Basarnas. Aplikasi E Kinerja BKN dan Aplikasi E Performance merupakan aplikasi yang dipergunakan sebagai dasar manajemen SAKIP di lingkungan Basarnas.

Tugas dan fungsi tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi dan pengelolaan administrasi kerja sama.

Biro Hukum dan Kerja Sama melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang di dalam Peraturan Badan untuk mendukung terwujudnya produk Hukum dan Kerja sama yang optimal sesuai dengan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020-2024. Biro Hukum dan Kerja Sama telah menetapkan sasaran kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2023 termasuk kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat mendukung sasaran serta tujuan dimaksud.

Secara umum Biro Hukum dan Kerja Sama telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan misi yang diembannya dengan mewujudkan tujuan dan sasaran tahun

2023. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Hukum dan Kerja Sama pada tahun tersebut. Realisasi anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Pagu	Ralisasi	Presentase	Keterangan
Total Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama	2.980.782.000	2.932.562.897	98,38%	Pembukaan Automatic Adjustmen pada Triwulan IV
Kerja Sama	1.818.677.000	1.807.309.695	99,37%	
Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.162.105.000	1.125.253.202	96,82%	

Pada Tahun 2023, Indikator Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama tercapai secara keseluruhan. Capaian hasil indikator kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	80%	141%	176.25%
		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	4	4.68	117.00%
2	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	80%	121%	151.25%
		Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	80%	118%	147.50%

Tercapainya indikator kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama selama tahun 2023, tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut adalah:

1) Pemotongan anggaran atau Automatic Adjustment sampai dengan 50% pada awal tahun 2023

2) Sumber daya manusia yang terbatas yang mengakibatkan tidak berjalannya aplikasi yang sudah dibuat untuk optimalisasi program penyusunan produk hukum dan kerja sama

3) Sinergitas yang belum optimal dalam proses penyusunan produk hukum dan kerja sama dengan unit kerja, Kementerian/Lembaga, serta *counterparts* terkait,

Dengan disusunnya LAKIP Biro Hukum dan Kerja Sama tahun 2023 ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan Biro Hukum dan Kerja Sama mencapai sasaran tahun 2023. Diharapkan Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta menjadi masukan dan umpan balik bagi peningkatan Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama dalam menunjang peningkatan kinerja Sekretariat Utama dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023 dapat disusun dengan baik. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari sasaran kegiatan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar peraturan tersebut Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator kinerja kegiatan dan target yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023. Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Jakarta, Desember 2023
Kepala Biro Hukum dan
Kerja Sama



Iwan Rosyadi, S.S.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	1
C. Permasalahan Utama.....	4
D. Sistematika Laporan	5
BAB II	6
PERENCAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis Biro Hukum dan Kerja Sama	6
B. Sasaran Biro Hukum dan Kerja Sama.....	7
C. Kegiatan/ Aktivitas Biro Hukum dan Kerja Sama.....	13
D. Cascading	15
E. Crosscutting	16
F. Perjanjian Kinerja	18
BAB III	20
AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA	20
B. PENGUKURAN KINERJA	21
C. Realisasi Anggaran	40
BAB V PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah dan Jenis Jabatan Biro Hukum dan Kerja Sama	3
Tabel 2 Indikator Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama.....	10
Tabel 3 Perubahan Indikator Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama.....	11
Tabel 4 Definisi dan Penjelasan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Kerja Sama	12
Tabel 5 Aktifitas Biro Hukum dan Kerja Sama.....	14
Tabel 6 Perjanjian Kinerja.....	19
Tabel 7 Anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama.....	19
Tabel 8 Capaian Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023	20
Tabel 9 Sasaran Kegiatan Terwujudnya Produk Hukum yang Berkualitas	21
Tabel 10 Perbandingan antara Target dengan Realisas1 Kinerja Tahun Ini	26
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	26
Tabel 12 Realisasi Kinerja Jangka Menengah	27
Tabel 13 Sasaran Kegiatan Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan ...	28
Tabel 14 Kerja Sama Basarnas dengan K/L lain.....	30
Tabel 15 Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	37
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan	38
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan	38
Tabel 18 Revisi Anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama	43
Tabel 19 Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama	3
Gambar 2 Tujuan dan Sasaran Basarnas serta Biro Hukum dan Kerja Sama	16
Gambar 3 Crosscutting Sasaran SK.10	17
Gambar 4 Croscutting Sasaran SK. 11	18
Gambar 5 Kegiatan Benchmarking JDIH dengan Pemprov Bandung dan Harmonisasi Peraturan	25
Gambar 6 Kegiatan Official Visit to National Search Relief Agency of the Republic of Indonesia (BASARNAS) to NADMA and SMART di Malaysia	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama merupakan bentuk komitmen nyata Biro Hukum dan Kerja Sama dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara teknis diatur dalam PERMENPAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga periode Rencana Strategis. Renstra Biro Hukum dan Kerja Sama kemudian diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja (PK) Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023. Oleh sebab itu, laporan kinerja yang disusun secara periodik diperlukan untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih oleh Biro Hukum dan Kerja Sama.

B. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Program Prioritas Nasional tentang penyederhanaan birokrasi menuntut Basarnas untuk melaksanakan perubahan dan penyederhanaan birokrasi agar mampu menciptakan birokrasi yang dinamis sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang prima, mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), percepatan sistem kerja, serta mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai pemerintah. Biro Hukum dan Kerja Sama merupakan Unit Eselon II yang tugas dan fungsinya tertuang di dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Biro Hukum dan Kerja Sama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Biro Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Biro. Biro Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi dan pengelolaan administrasi kerja sama.

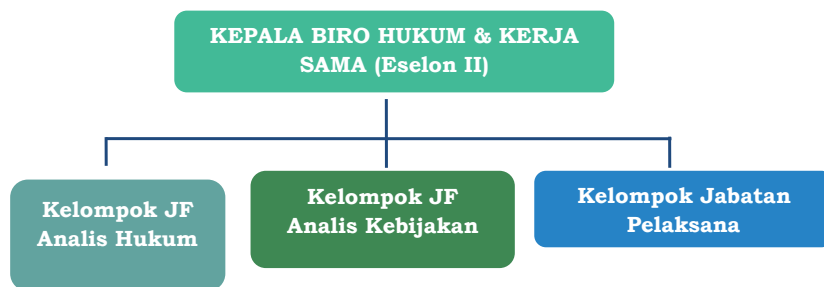
Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, produk hukum, dan naskah kerja sama;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian advokasi hukum;
- c. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan analisis hukum;
- e. penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

2. Struktur Organisasi

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, Biro Hukum dan Kerja Sama didukung oleh 3 (tiga) kelompok jabatan, yaitu:

- a. Kelompok JF Analis Hukum
- b. Kelompok JF Analis Kebijakan
- c. Kelompok Jabatan Pelaksana



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama

Sumber daya manusia di lingkungan Biro Hukum dan Kerja Sama tahun 2023, meliputi:

Jabatan	Jumlah
E.II.a	1
Jabatan Pelaksana	7
JFT Perancang Peraturan	1
JFT Analis Hukum	6
JFT Analis Kebijakan	3
JFT Arsiparis	2
Jumlah	20

Tabel 1 Jumlah dan Jenis Jabatan Biro Hukum dan Kerja Sama

Adapun kelompok Kerja di Biro Hukum Dan Kerja Sama yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai, yaitu:

- Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan
- Kelompok Kerja Penetapan (Keputusan Kepala Badan, Keputusan Sestama)
- Kelompok Kerja Penetapan (Keputusan Deputi)
- Kelompok Kerja Analisa dan Evaluasi Peraturan
- Kelompok Kerja Advokasi

- f. Kelompok Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- g. Kelompok Kerja Reformasi dan Birokrasi
- h. Kelompok Kerja Tata Usaha Biro Hukum dan Kerja Sama
- i. Kelompok Kerja Perjanjian dalam Negeri Basarnas-K/L, Instansi, dan Pemerintah Daerah
- j. Kelompok Kerja Perjanjian dalam Negeri Basarnas-Ormas dan Lembaga Pendidikan
- k. Kelompok Kerja Perjanjian Basarnas dengan Sektor Swasta dan Bumh/D
- l. Kelompok Kerja Asistensi Perjanjian Upt Wilayah Timur
- m. Kelompok Kerja Asistensi Perjanjian Upt Wilayah Barat
- n. Kelompok Kerja Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama
- o. Kelompok Kerja Sama Luar Negeri
- p. Kelompok Kerja Fasilitasi Administrasi Perjalanan Dinas luar Negeri
- q. Global Position Insarag Flexible Response Sub Working Group

C. Permasalahan Utama

Berikut merupakan permasalahan yang dihadapi Biro Hukum dan Kerja Sama selama satu tahun masa anggaran dalam mencapai target kinerja.

1. Keterbatasan anggaran dalam proses pembentukan peraturan di lingkungan Basarnas dapat menjadi kendala serius yang mempengaruhi efektivitas dan kualitas peraturan yang dihasilkan. Hal ini dapat mengurangi kemampuan Basarnas untuk melakukan penelitian, analisis, dan konsultasi yang diperlukan untuk merumuskan peraturan yang baik, Proses pembentukan peraturan yang terburu-buru atau tanpa penelitian dan analisis yang memadai dapat menghasilkan peraturan yang tidak efektif, tidak jelas, atau tidak memadai untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
2. Keterbatasan sumber daya manusia. Banyak peraturan Basarnas yang akan melibatkan lebih dari satu lembaga atau departemen pemerintah. Koordinasi yang efektif antarlembaga dapat menjadi tantangan, terutama jika ada perbedaan kepentingan atau prioritas di antara stakeholder lain.
3. Komunikasi yang tidak efektif sering menjadi hambatan utama dalam kerja sama.

4. Kurangnya keterampilan kolaborasi. Kerja sama yang efektif membutuhkan keterampilan kolaborasi, seperti kemampuan mendengarkan aktif, negosiasi, kepemimpinan yang inklusif, dan kemampuan mengatasi konflik. Kurangnya keterampilan ini dapat menghambat kerja sama yang efektif.
5. Perbedaan budaya dan nilai: dalam kerja sama lintas budaya atau antara organisasi dengan budaya yang berbeda, perbedaan dalam nilai-nilai, norma, atau etika dapat menjadi hambatan. Ketidakpahaman atau kesalahpahaman budaya dapat menghambat komunikasi dan mempersulit kerja sama.
6. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab: jika peran dan tanggung jawab dalam kerja sama tidak ditetapkan dengan jelas, ini dapat menyebabkan kebingungan, tumpang tindih, atau kurangnya akuntabilitas. Hal ini dapat menghambat produktivitas dan koordinasi yang efektif

D. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja ini terdiri dari empat BAB

1. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Strategis memuat Peta Strategis Biro Hukum dan Kerja Sama, ringkasan ikhtisar Renstra Biro Hukum dan Kerja Sama, cascading dari Sasaran Program ke sasaran Kegiatan, Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama dan penjelasan terkait redesain Program dan menindaklanjutinya dengan penyusunan RO/KRO serta kegiatan/aktivitas yang akan dijadikan rencana aksi
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat:
 - a. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis Biro Hukum dan Kerja Sama sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama.
 - b. Pengukuran Kinerja, bab ini menjelaskan tentang Analisis capaian Kinerja

- c. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja
- d. Kegiatan eksklusif di Biro Hukum dan Kerja Sama di Tahun 2023
- 4. Bab IV Penutup memuat simpulan umum atas capaian kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama
- 5. Lampiran memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023

BAB II

PERENCAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Biro Hukum dan Kerja Sama

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan strategis tersebut diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama, terutama dalam:

1. Terwujudnya produk hukum yang berkualitas (SK10 dengan IKS10.1, IKS10.2, tabel 4.1) melalui peningkatan ketersediaan peraturan perundang-undangan bidang pencarian dan pertolongan, advokasi bagi pegawai dan informasi hukum.
2. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan (SK11 dengan IKS11.1, IKS11.2)

Dalam mencapai Sasaran, Biro Hukum dan Kerja Sama menjalankan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. terwujudnya peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian bantuan hukum terhadap anggota Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - c. sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan badan dan peraturan kepala badan.
2. Peningkatan kerja sama di bidang pencarian dan Pertolongan antara lain:

- a. Koordinasi pelaksanaan kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri
- b. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri.

B. Sasaran Biro Hukum dan Kerja Sama

Penjabaran pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum dan Kerja Sama menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, sasaran strategis Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Stakeholder Perspective

Dalam konteks ini, maka sasaran strategis (SS) Biro Hukum dan Kerja Sama pada level *stakeholders perspectives* merepresentasikan pencapaian Tujuan Program (TP) dalam Renstra Basarnas tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Kepala Basarnas kepada Sekretaris Utama untuk mewujudkannya, maka Tujuan Program (TP) terkait dengan program dukungan manajemen Basarnas adalah TP5 Terwujudnya Regulasi dan Kelembagaan Yang Berkualitas.

2. Customer Perspective

Dalam konteks ini, maka sasaran Program (SP) Biro Hukum dan Kerja Sama pada level *Customers Perspectives* merepresentasikan pencapaian Sasaran Program (SP) Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama untuk mewujudkannya. Dalam hal ini, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, maka Sasaran Program (SP) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Kerja Sama antara lain:

- a. Sasaran Program (SP 10) sepuluh, Meningkatnya efektifitas Regulasi dibidang pencarian dan pertolongan;

- b. Sasaran Program (SP 11) sebelas, Meningkatnya Kerja Sama di bidang pencarian dan pertolongan

3. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Biro Hukum dan Kerja Sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan kegiatan Biro Hukum dan Kerja Sama sesuai dengan struktur organisasi, sehingga dalam perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini ditetapkan sejumlah Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi tanggung jawab masing-masing Bagian di Lingkungan Biro Hukum dan Kerja Sama, *Internal Business Process* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan pertama : terwujudnya produk hukum yang berkualitas;
- b. Sasaran kegiatan kedua : meningkatnya Kerja Sama di bidang pencarian dan pertolongan;

Dari masing-masing Sasaran kegiatan (SK) didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagaimana terlampir.

4. *Learn and Growth*

Perspektif *Learning and Growth* (LGP) ini merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari Biro Hukum dan Kerja Sama untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini ditetapkan untuk perspektif *Learning and Growth* (LGP) antara lain: ASN yang profesional, anggaran dan teknologi informasi.

Dari keempat perspektif di atas, *Stakeholder Perspective* merupakan Sasaran Basarnas, ***Customer Perspectives*** ini merupakan Sasaran Program (SP) Sekretariat Utama, *Internal Business Process Perspectives* merupakan Sasaran Kegiatan (SK) Biro Hukum dan Kerja Sama, dan *Learning and Growth Perspective* merupakan masukan (*input*) untuk mencapai sasaran kegiatan.

Pada Tahun 2023 Biro Hukum dan Kerja Sama melaksanakan reuiu atas Indikator Kinerja dengan dasar:

1. Surat Kementerian PANRB Nomor B/86/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Rekomendasi yang terdapat pada surat dimaksud antara lain:
 - a. melakukan perbaikan atas Indikator Kinerja pada Unit Kerja yang belum memenuhi kriteria Indikator Kinerja yang baik, maupun yang belum cukup untuk menggambarkan kinerja yang diharapkan pada Unit Kerja tersebut.
 - b. Melakukan Review atas Rencana Aksi
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor: 6 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;

Perubahan terjadi di Unit Kerja Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis pada umumnya dan di Biro Hukum dan Kerja Sama pada khususnya. Sedangkan Tujuan dan Sasaran Kegiatan masih sesuai dengan Renstra 2020 – 2024.

Perubahan Indikator pada Unit Kerja juga berdampak pada Perubahan Renstra Biro Hukum dan Kerja Sama, sehingga perlu dilaksanakan Reuiu Renstra Biro Hukum dan Kerja Sama 2020-2024. Definisi indikator, cara perhitungan, penanggungjawab data dan lain sebagainya dapat dilihat pada Manual IKU halaman Lampiran. Pada Tabel berikut adalah Indikator Kinerja Kegiatan yang telah direuiu.

Sasaran		Indikator Kinerja Kegiatan / Aktivitas	
SK10.1.1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK 10.1.1.a	Persentase NSPK yang ditetapkan
		IKSK 10.1.1.b	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Produk Hukum
SP.11	Meningkatnya kerja sama di bidang	IKSK. 11.1.1.a	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan

	Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 11.1.1.b	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti
--	------------------------------	----------------	--

Tabel 2 Indikator Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama

Perubahan hanya terdapat pada IKS 10.1.1.b Persentase Kepuasan Layanan Informasi Hukum menjadi Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Produk Hukum. menjadi Biro Hukum dan Kerja Sama. Semula ada 2 (dua) Indikator dan menjadi 1 (satu) Indikator. Pengurangan anggaran juga menyebabkan perubahan pada target indikator dan target pendanaan di Biro Hukum dan Kerja Sama. Perubahan tersebut dimulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Perubahan indikator dapat dilihat di tabel berikut beserta dengan penjelasan indikator beserta perhitungannya.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			
	SEMULA	MENJADI	2021	2022	2023	2024
SK10.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	2. Persentase Kepuasan Layanan Informasi Hukum	2. Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	100%	100%	4	4

Tabel 3 Perubahan Indikator Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumus Perhitungan
SP 10.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK 10.1.1.a Persentase NSPK yang ditetapkan	%	Mengukur persentase NSPK yang ditetapkan $\% \text{ NSPK yang ditetapkan} = \frac{N1+N2}{2}$ N1 % Peraturan Badan yang ditetapkan = $\% \text{ Perban yang ditetapkan} = \frac{\text{Jml. usulan Perban}}{\text{Jml. Perban yang disahkan}} \times 100\%$ N2 % Instrumen Hukum lain yang ditetapkan = $\text{Instrumen Hukum yang ditetapkan} = \frac{\text{Jml. usulan Instrumen Hukum}}{\text{Jml. Instrumen Hukum yang disahkan}}$
	IKSK 10.1.1.b Indeks Kepuasan Layanan Produk Hukum	Skala 1-5	Hasil survei kepuasan layanan informasi hukum
SP.11 Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 11.1.1.a Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah penyusunan dokumen kerja sama SAR dibandingkan dengan jumlah kerja sama SAR yang direncanakan. $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen Kerjasama SAR}}{\text{Jumlah Dokumen Kerja sama SAR yang direncanakan}} \right) \times 100\%$
	IKSK. 11.1.1.b Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	%	Indikator ini mengukur jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dari perjanjian kerjasama yang sudah ada melalui jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan. $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}} \right) \times 100\%$

Tabel 4 Definisi dan Penjelasan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Kerja Sama

C. Kegiatan/ Aktifitas Biro Hukum dan Kerja Sama

Dalam mendukung indikator Biro Hukum dan Kerja Sama, dirumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja agar target pada indikator dapat terpenuhi. Untuk mendukung Sasaran meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan, beberapa langkah strategis untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut antara lain:

1. Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Dalam Negeri
2. Workshop Kerjasama SAR Dalam Negeri
3. Penyusunan Dokumen Kerjasama SAR
4. Penyusunan Juknis tentang Kerja Sama
5. Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Luar Negeri
6. Workshop Kerjasama SAR Luar Negeri

Untuk mendukung sasaran mewujudkan produk hukum yang berkualitas, beberapa langkah strategis untuk mendukung sasaran tersebut antara lain:

1. Penyusunan Peraturan Perundangan
2. Harmonisasi Peraturan Perundangan
3. Penelaahan Bidang Hukum
4. Reviu dan Evaluasi Peraturan Perundangan
5. Penyebarluasan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
7. Koordinasi Advokasi dan Pendampingan Hukum

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	AKTIFITAS	VOLUME
1	Meningkatnya Kerja sama dibidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase tingkat kerja sama dibidang pencarian dan pertolongan	Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Dalam Negeri Workshop Kerjasama SAR Dalam Negeri Penyusunan Dokumen Kerjasama SAR Penyusunan Juknis tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Luar Negeri	6 Dok
		Persentase kerja sama dibidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	Workshop Kerjasama SAR Luar Negeri	6 Dok
2	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan	Penyusunan Peraturan Perundangan Harmonisasi Peraturan Perundangan Penelaahan Bidang Hukum Reviu dan Evaluasi Peraturan Perundangan Penyebarluasan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	7 Dok
		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Koordinasi Advokasi dan Pendampingan Hukum	1 Layanan

Tabel 5 Aktifitas Biro Hukum dan Kerja Sama

D. Cascading

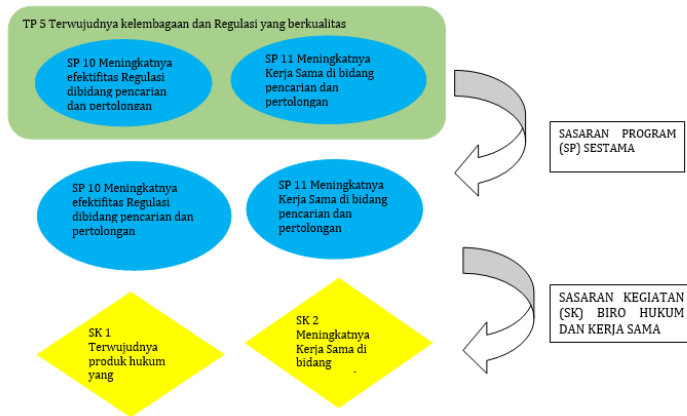
Pada dasarnya, *cascading* Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Basarnas telah dilakukan secara hierarkis sesuai dengan level pengelolaan kinerja Basarnas sampai dengan Unit Kerja. *Cascading* IKU Basarnas memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab Unit Kerja mulai dari Kepala Badan, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II hingga di-cascade (diturunkan) hingga level Jabatan Fungsional dan pelaksana. Basarnas telah melaksanakan Permenpan 8 Tahun 2021 pada Tahun 2021 lalu dan Permenpan 6 Tahun 2022 untuk penyusunan SKP tahun 2023.



Tujuan dan Sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Cascade dari TP5, turun dari Sasaran Program SESTAMA





Gambar 2 Tujuan dan Sasaran Basarnas serta Biro Hukum dan Kerja Sama

E. Crosscutting

Cross cutting program yaitu perencanaan yang terintegrasi yang berarti juga merencanakan penganggaran yang terintegrasi dengan Unit kerja lain. Pembahasan Crosscutting berawal dari Peta Proses Bisnis. Peta Proses bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi / unit kerja Basarnas untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian unit kerja agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

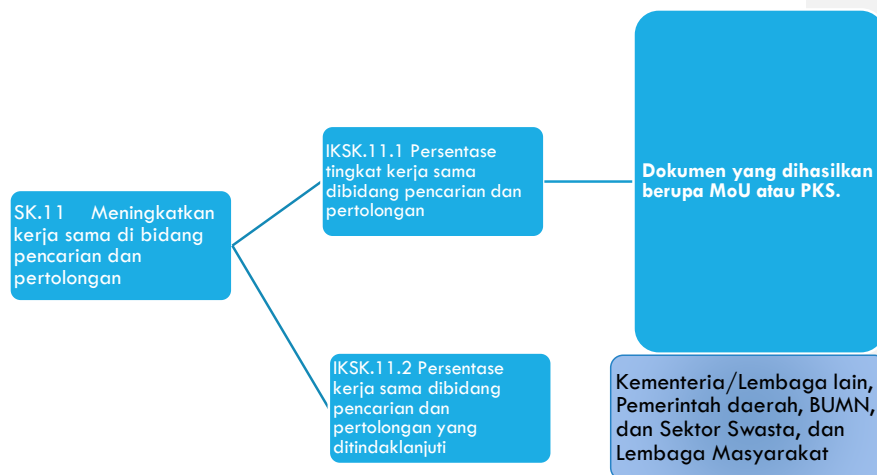
Koordinasi antar lembaga: Instansi pemerintah terdiri dari berbagai lembaga atau departemen yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Namun, seringkali tugas dan tanggung jawab tersebut saling terkait. Oleh karena itu, crosscutting kinerja dapat membantu dalam koordinasi antar lembaga dan memastikan bahwa tujuan dan program pemerintah terintegrasi dengan baik. Pengelolaan keuangan: Instansi pemerintah harus mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien. Crosscutting kinerja dalam pengelolaan keuangan dapat membantu untuk

mengidentifikasi dan memprioritaskan penggunaan sumber daya publik yang paling efektif dalam uan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kebijakan: Crosscutting kinerja juga penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini melibatkan koordinasi antar lembaga, perencanaan yang terintegrasi, dan pengelolaan risiko yang baik. Biro Hukum dan Kerja Sama melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai serta *Counterparts* untuk pelaksanaan Kerja Sama dalam negeri maupun luar negeri.



Gambar 3 Crosscutting Sasaran SK.10



Gambar 4 Croscutting Sasaran SK. 11

F. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	80%

		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	4
2.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	80%
		Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	80%

Tabel 6 Perjanjian Kinerja

Berikut merupakan anggaran yang dilimpahkan kepada Biro Hukum dan Kerja Sama dengan pembukaan Automatic Adjustment pada akhir tahun menyebabkan dilaksanakannya revisi anggaran dan kegiatan.

		Pagu Awal	Pagu Revisi Unlock AA
Total		1.674.997.000	2.980.782.000
Kerja Sama		1.000.000.000	1.818.677.000
Layanan	Dukungan	674.997.000	1.162.105.000
Manajemen Internal			

Tabel 7 Anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada TA 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis diukur dari capaian kinerja suatu organisasi. Capaian kinerja organisasi dihitung berdasarkan keberhasilan Biro Biro Hukum dan Kerja Sama dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dari pencapaian Indikator Kinerja tersebut difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, sedangkan Indikator Kinerja lainnya merupakan pendukung dari tercapainya IKU tersebut.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	80%	141%	176.25%
		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	4	4.68	117.00%
2	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	80%	121%	151.25%
		Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	80%	118%	147.50%

Tabel 8 Capaian Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023

B. PENGUKURAN KINERJA

Secara umum terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan Kerja Sama yang merupakan turunan Sasaran Sekretaris Utama. Penjelasan terkait target kinerja, realisasi dan capaian untuk masing masing Sasaran Kegiatan yang ada di Biro Hukum dan Kerja Sama sebagai berikut:

a) Capaian

1. Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Produk Hukum yang Berkualitas”

Sasaran ini didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Persentase kerja sama di bidang SAR dan Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti. Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	80%	141%	176.25%
		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	4	4.68	117.00%

Tabel 9 Sasaran Kegiatan Terwujudnya Produk Hukum yang Berkualitas

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Basarnas memiliki tugas menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, dan menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Di mana Basarnas perlu mengeluarkan peraturan yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, Biro Hukum dan Kerja Sama dalam tugasnya adalah membentuk peraturan-peraturan yang diprakarsai oleh unit kerja terkait.

Selain dari pembentukan peraturan, Biro Hukum dan Kerja Sama juga memiliki tugas untuk melaksanakan Advokasi dan Pendampingan hukum sesuai dengan PERATURAN BADAN SAR NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL. Berikut peraturan-peraturan yang telah disusun dan pendampingan hukum yang telah dilaksanakan Biro Hukum dan Kerja Sama selama tahun 2023.

a) Layanan Hukum

Dalam hal kegiatan penataan produk hukum, Biro Hukum dan Kerjasama dengan melibatkan satker-satker terkait telah menetapkan program penyusunan peraturan dalam 1 (satu) tahun kalender sebanyak 7 (tujuh) usulan dari pemrakarsa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK. KBSN-90/HK.02.01/IV/BSN-2023 Tentang Program Penyusunan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Peraturan selain Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023. Adapun Produk Hukum yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan:
 - a. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan SAR Nasional Dalam Rangka Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 - b. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan;
 - c. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Sarana Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- d. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Pengakreditasi Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan Bangunan;
- e. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Seragam Tugas Potensi Pencarian dan Pertolongan;

Adapula Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah dilakukan penyusunan dan telah diusulkan untuk diharmonisasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM namun arahan Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM terdapat beberapa hal masih harus dilakukan pembahasan, adapun rancangan peraturan tersebut antara lain :

- a. Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Rencana Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - b. Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Kondisi Membahayakan Manusia
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan:
- a. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan SAR Heroes dan SAR Awards;
 - b. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pecarian Dan Pertolongan
 - c. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
3. Pedoman:
- Pedoman Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

4. Petunjuk Teknis (Juknis):

- a. Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelatihan Medis Personel Urban Sar
- b. Petunjuk Teknis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengoprasian Radio Pencarian Arah

5. Surat Edaran

- a. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- b. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penunaian Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Unit Pengumpulan Zakat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- c. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengemban Fungsi Kehumasan
- d. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Siaga Rutin Pencarian Dan Pertolongan
- e. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Upaya Preventif Tindakan Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

b. **Layanan Bantuan Hukum**

- a) Advokasi dan pendampingan hukum guna menindaklanjuti Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nomor: T/0077/LM.44-14/0022.2023/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 Hal Permintaan Klarifikasi Secara Langsung pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap
- b) Bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap telah menindaklanjuti aduan yang masuk. Dari surat pengaduan yang masuk ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap kemudian menindaklanjuti pengaduan yang masuk dengan melakukan

klarifikasi kepada Saudara Mudo Dwi Imam Utomo dan dari hasil klarifikasi bahwa permasalahan yang timbul merupakan permasalahan pribadi.

- c) Menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait adanya tindak pidana korupsi OTT di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 30 Oktober, 6, 13 dan 20 November 2023
- d) Mendampingi pegawai negeri sipil guna memberikan keterangan di Puspom TNI terkait tindak pidana korupsi OTT di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tanggal 22 November 2023
- e) Mendampingi pegawai negeri sipil yang dipanggil guna diminta keterangan atas dugaan korupsi pengadaan trus angkut personel dan *rescue carrier vehicle* tahun 2014 tanggal 23 November 2023.



Gambar 5 Kegiatan Benchmarking JDIH dengan Pemprov Bandung dan Harmonisasi Peraturan Badan

1) Analisis Capaian untuk Sasaran Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	80%	141%	176.25%
		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	4	4.68	117.00%

Tabel 10 Perbandingan antara Target dengan Realisasi1 Kinerja Tahun Ini

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan telah mencapai target.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	2021	80%	100%	100%
	2022	80%	100%	100%
	2023	80%	141%	117%
Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	2021	4	4	100%
	2022	4	4	100%
	2023	4	4.68	100%

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Commented [A1]:

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan pada tahun 2023 telah mengalami kenaikan.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	2021	80%	100%	100%
	2022	80%	100%	100%
	2023	80%	141%	117%
Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	2021	4	4	100%
	2022	4	4	100%
	2023	4	4.68	100%

Tabel 12 Realisasi Kinerja Jangka Menengah

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.
- Untuk pencapaian sasaran kinerja Terwujudnya produk hukum yang berkualitas untuk Tahun 2023 target telah tercapai. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
- Adanya koordinasi Biro Hukum dan Kerja Sama dengan unit kerja pemrakarsa untuk segera melaksanakan pembahasan draft program penyusunan peraturan
 - Koordinasi yang optimal dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pembahasan dan harmonisasi
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama Tahun 2023 Biro Hukum dan Kerja Sama telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Keterlibatan Pimpinan dalam melaksanakan Koordinasi yang efektif dan efisien.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment di Biro Hukum dan Kerja Sama dan Kerjasama.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pemanfaatan media Zoom dan Teleconference juga sangat membantu Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Kerjasama
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik.

2. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan”

Sasaran ini didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Persentase kerja sama di bidang SAR dan Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti. Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	80%	121%	151.25%
	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	80%	118%	147.50%

Tabel 13 Sasaran Kegiatan Meningkatkan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warga negara asing untuk menunjang

tugas dan fungsinya. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pelaksanaan kerja sama dalam negeri tersebut diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). MoU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU bisa juga disebut sebagai perjanjian pendahuluan yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Selanjutnya masing-masing instansi mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing yang kemudian diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Basarnas menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama tersebut dilakukan dengan pihak lain di dalam negeri dan di luar negeri. Berikut adalah penjelasan kegiatan terkait kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Basarnas pada Tahun 2023.

a. Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam rangka penyelenggaraan SAR Basarnas melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pembahasan kerja sama antara Basarnas dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Universitas, Rumah Sakit, BUMN dan Perusahaan. Berikut kerja sama dalam negeri yang telah ditandatangani oleh Basarnas dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Universitas, Rumah Sakit, BUMN dan Perusahaan Tahun Anggaran 2023:

No	Kerja Sama	Tanggal
1.	MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	15 Februari 2023 s.d. 15 Februari 2028
2.	PKS dengan Perum LPPNPI tentang Alerting Service	8 Maret 2023 s.d. 8 April 2023

3.	MoU dengan PT Kereta Api Cepat Indonesia China tentang Penyelenggaraan Pencarian dan pertolongan pada Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta-Bandung	15 Februari 2023 s.d. 15 Februari 2028
4.	MoU dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	15 Februari 2023 s.d. 15 Februari 2028
5.	PKS dengan PT Bank Mandiri (Tbk) tentang Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	3 Mei 2023 s.d. 3 Mei 2028
6.	PKS dengan PT Bank Mandiri (Persero) tentang Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia	3 Mei 2023 s.d. 3 Mei 2028
7.	MoU dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	9 Juli 2023 s.d. 9 Juli 2028
8	MoU dengan Institut Teknologi Petroleum Balongan tentang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	12 September 2023 s.d. 12 September 2028

Tabel 14 Kerja Sama Basarnas dengan Badan Usaha dan Lembaga

b. Kerja Sama Luar Negeri

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang SAR dan/atau negara asing. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama bilateral, regional maupun multilateral.

1) Kerja Sama Bilateral

Basarnas telah membuat naskah kerja sama dengan berbagai otoritas SAR negara-negara lain dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *SAR arrangement*. Kerja sama tersebut antara lain dilaksanakan dengan Singapura, Malaysia, Australia, Timor Leste, Sri Lanka dan RRT. Pada Tahun 2021-2023 dilaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana penjelasan di bawah ini.

A. Kerja Sama Indonesia-Australia

- a) Kerja sama Indonesia-Australia dilaksanakan dalam kerangka kerja sama Indonesia *Transport Safety Assistance Package* (ITSAP). Paket bantuan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 - 2023 adalah:

- *Indonesia-Australia SAR Forum*

- *Review SAR MoU*
- *Intensive English Course*
- *E-Broadcast Training*
- *SARMAP Training*
- *SAR Calculator Training*

b) Pada bulan Juni 2023 Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menghadiri *Asia Pacific Heads of Maritime Safety Agencies* (APHoMSA) Forum di Sydney, Australia.

B. Kerja Sama Indonesia-RRT

Pada bulan Mei 2023 Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menghadiri *Conference International Maritime Rescue Federation* di Wuhan, sekaligus kunjungan dan pertemuan dengan Menteri Emergency Management di Beijing membahas potensi kerja sama pencarian dan pertolongan bilateral kedua negara

C. Kerja Sama Indonesia-Singapura

a) Telah ditandatangani *Supplementary Letter of Operational Coordination Agreements* (SLOCA) di Singapura pada tanggal 13 Februari 2023. Penandatanganan *Supplementary Letters of Operational Coordination Agreements* oleh Sekretaris Jenderal, Deputy BMKG, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas dan Airnav Indonesia yang disaksikan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. SLOCA tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan *Letter of Operational Coordination Agreements* (LOCA) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, *Deputy Secretary Ministry of Transport of the Republic of Singapore* dan *Director-General Civil Aviation Authority of Singapore*. Kedua perjanjian tersebut (LOCA dan SLOCA) merupakan bagian dari kesepakatan kedua negara terhadap pengaturan *Flight Information Region* (FIR) pada navigasi penerbangan.

- b) Pada bulan Maret 2023 telah ditandatangani MoU antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan *Singapore Civil Defence Force (SCDF) on Urban Search and Rescue* dihadapan kedua kepala negara pada kegiatan *Leader Retreat Indonesia-Singapore 2023* di Singapura.

D. Kerja Sama Indonesia-Srilanka

Pada awal tahun 2023 telah dimulai pembahasan perpanjangan MoU bidang pencarian dan pertolongan kedua negara yang akan habis masa berlakunya pada tahun 2023 ini.

E. Kerja Sama Indonesia-Malaysia

Pada awal tahun 2023 dimulai rencana pembahasan MoU bidang pencarian dan pertolongan kedua negara antara Basarnas dan *Civil Aviation Authority of Malaysia*.

2) Kerja Sama Regional

1) ASEAN Transport SAR Forum ke-10

ASEAN Transport SAR Forum (ATSF) merupakan forum otoritas SAR penerbangan dan pelayaran di ASEAN yang dibentuk sebagai tindak lanjut pertemuan ASEAN SAR Expert Group Meeting di Yangon, Myanmar pada tanggal 16-17 Oktober 2012. Forum ini diprakarsai oleh Basarnas. Dalam pertemuan tersebut para menteri transportasi ASEAN bersepakat untuk mengintensifkan kerja sama SAR untuk mendukung sektor transportasi. Forum ini menyelenggarakan pertemuan secara berkala setiap tahun bertempat di negara yang menjadi Sekretaris ASEAN. Kegiatan yang dilaksanakan pada forum ini antara lain adalah pertemuan tahunan ATSF, penyusunan ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue, penyusunan Search and Rescue Operational Procedure, latihan bersama ATSF yang sementara ini dilaksanakan dalam bentuk latihan posko dan pelatihan SAR.

- 2) Pertemuan ATSF ke-10 ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 18 September 2023 mengingat keadaan pandemi akibat wabah covid-19 dengan Brunei Darussalam sebagai tuan rumah pertemuan.

- 3) IORA (*Indian Ocean Rim Association*)

IORA adalah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di wilayah Samudera Hindia. Organisasi ini dibentuk karena melihat adanya berbagai tantangan di kawasan Samudera Hindia, maka diperlukan kerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (perdagangan dan investasi). Nilai penting organisasi ini bagi Indonesia adalah:

- a) Memperluas pengaruh dan memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan Samudera Hindia sebagai *new growth center* di kawasan.
- b) Mengatasi berbagai tantangan yang muncul di Samudera Hindia seperti *maritime safety and security, illicit drug trafficking, people smuggling, Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, piracy, economic growth, dan climate change*.
- c) Merupakan organisasi kerja sama maritim yang komprehensif guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai visi Nawa Cita Presiden RI.
- d) Pada tahun 2022 Basarnas mewakili pemerintah Indonesia telah menandatangani *The Governments of the Member States of the Indian Ocean Rim Association (IORA) on The coordination and cooperation of SAR Services in the Indian Ocean Region*.

- 3) Kerja Sama Organisasi Internasional

Sebagai otoritas SAR di Indonesia, Basarnas berperan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi internasional terkait di bidang penerbangan, pelayaran, pemanfaatan satelit SAR dan *urban SAR*. Kegiatan kerja sama Basarnas pada organisasi-organisasi tersebut adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1) *International Civil Aviation Organization (ICAO)*

Kegiatan Basarnas dalam otoritas ini untuk mendukung Indonesia sebagai anggota ICAO dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai instansi penjurur. Kegiatan yang dihadiri oleh Basarnas antara lain berupa:

- a. Seventh Meeting of the ICAO Asia/Pacific Search and Rescue Working Group (APSAR/WG/7);
- b. Eleventh Meeting of the Air Traffic Management Sub-Group (ATM/SG/11) of APANPIRG pada tanggal 2 s.d. 6 Oktober 2023 di Singapura;
- c. ICAO SAIOACG/13 dan SEACG/29;
- d. Seventh Meeting of the ICAO Asia/Pacific Search and Rescue Working Group (APSAR/WG/7)
- e. The 34th Asia/Pacific Air Navigation and Implementation Regional Group (APANPIRG/34) di HongkongThe 34th Asia/Pacific Air Navigation and Implementation Regional Group (APANPIRG/34)

Pemenuhan ICAO Asia Pacific SAR *Performance Indicators*. Indonesia telah berhasil memenuhi *Asia Pasific SAR Performance Indicator Regional SAR Plan* sebesar 95% yang menempatkan Indonesia sebagai 4 besar penyelenggara SAR penerbangan di 34ersama Asia Pasifik 34ersama dengan Singapura, Australia, Amerika Serikat dan Indonesia.

2) *International Maritime Organization (IMO)*

Kegiatan Basarnas dalam otoritas ini untuk mendukung Indonesia sebagai anggota IMO dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi penjurur. Selama Tahun 2023 pertemuan IMO yang dihadiri oleh perwakilan Basarnas antara lain adalah:

- a. *International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC)* di London, Inggris.

3) *International COSPAS-SARSAT Programme*

COSPAS singkatan dari bahasa Rusia yaitu *Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov* (sistem pencarian luar angkasa untuk kapal yang mengalami keadaan darurat) sedangkan SARSAT singkatan dari *Search and Rescue Satellite Aided Tracking*. Organisasi ini merupakan organisasi internasional di bidang pemanfaatan satelit untuk mendukung penyelenggaraan SAR yang beranggotakan 45 negara pemilik stasiun bumi atau *Local User Terminal* (LUT) dan pengelola satelit SAR.

4) *International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG)*

INSARAG merupakan suatu jaringan global yang terdiri lebih dari 90 negara dan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) khususnya di bawah koordinasi *United Nation Office for Coordination and Humanitarian Affairs* (UN-OCHA). INSARAG memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan metodologi koordinasi bagi *Tim Urban Search and Rescue* (USAR) Internasional. Pendirian organisasi ini didukung dengan Resolusi Sidang Umum PBB 57/150 tahun 2002 tentang *Strengthening the Effectiveness and Coordination of International Urban Search and Rescue Assistance*.

Basarnas sebagai anggota INASAR yang aktif telah membentuk *Indonesia Search and Rescue (INASAR) Team*, yang memperoleh dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan berbagai Kementerian dan Lembaga lainnya. Tim INASAR merupakan tim yang dibentuk untuk melaksanakan operasi SAR pada reruntuhan bangunan yang disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan bencana lainnya. Pada tanggal 26 s.d. 29 November 2019 Tim INASAR telah berhasil mengikuti *INSARAG External Classification* (IEC) dan dinyatakan lulus sebagai *INSARAG-Medium USAR Team*.

Basarnas juga merencanakan untuk meningkatkan klasifikasi tim INASAR dari klasifikasi *Medium* ke *Heavy USAR Team* pada tahun 2023. Secara bersamaan, Basarnas akan membentuk tim *Urban SAR* di berbagai wilayah di Indonesia melalui program akreditasi nasional. Tujuan pembentukan tim tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan tim SAR di berbagai daerah dan mempercepat waktu tanggap serta kualitas pelaksanaan operasi SAR terutama di wilayah yang rawan bencana.



Gambar 6 Kegiatan Official Visit to National Search Relief Agency of the Republic of Indonesia (BASARNAS) to NADMA and SMART di Malaysia

a. Analisis Capaian untuk Sasaran Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi Sasaran Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	80%	121%	151.25%
	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	80%	118%	147.50%

Tabel 15 Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatkan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan telah mencapai target.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warga negara asing untuk menunjang tugas dan fungsinya. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	80%	141%	151%
Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	80%	118%	147%

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan telah mencapai targetnya serta tidak mengalami penurunan maupun kenaikan.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	80%	141%	151%
Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	80%	118%	147%

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.
Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan untuk Tahun 2023 target telah tercapai.

Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Adanya koordinasi Basarnas dengan organisasi atau instansi lain baik dalam maupun luar negeri sehingga tercapai kerja sama yang baik
- Peran aktif Basarnas dalam kegiatan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan
- Menjaga hubungan baik dengan Mitra merupakan bagian dari langkah Kerjasama, selain menjaga hubungan baik, Basarnas juga membangun Kerjasama dengan Mitra dalam rangka tugas pokok Pencarian dan Pertolongan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2022 Biro Hukum dan Kerja Sama telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Keterlibatan Pimpinan dalam melaksanakan Koordinasi yang efektif dan efisien.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment di Biro Hukum dan Kerja Sama dan Kerjasama.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pemanfaatan media Zoom dan Teleconference juga sangat membantu Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Kerjasama
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik.
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Anggaran Biro Perencanaan dan Kerjasama masuk dalam Program Dukungan Manajemen. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan adalah Penyusunan dokumen Kerja Sama SAR, Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR luar

negeri, Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR dalam negeri, workshop kerja sama SAR dalam negeri, Penyusunan Juknis tentang Kerja sama SAR, Penyelenggaraan Regional Meeting (INSARAG), workshop Kerja Sama SAR Luar Negeri

-

C. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun anggaran, Biro Hukum dan Kerja Sama mendapatkan anggaran sebesar Rp. **3.699.995.000** dan mengalami pemotongan **(Automatic Adjustment)** sebesar Rp. **2.024.998.000**. Namun pada Triwulan IV, Biro Hukum dan Kerja Sama membuka blokir Automatic Adjustment tersebut. Rincian anggaran terdapat pada tabel berikut:

Uraian					Pagu Awal	AA	Pagu Setelah AA	UNLOCK AA	PAGU AKHIR
	WA.6933	Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama			3.699.995.000	2.024.998.000	1.674.997.000	1.305.785.000	2.980.782.000
	AEC	Kerja sama			2.200.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000	818.677.000	1.818.677.000
	AEC.001	Kerja Sama Dalam Negeri			925.296.000	462.648.000	462.648.000	288.148.000	750.796.000
		171	Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri		925.296.000	462.648.000	462.648.000	288.148.000	750.796.000
			171.0A	Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Dalam Negeri	320.000.000	160.000.000	160.000.000	150.000.000	310.000.000
			171.0B	Workshop Kerjasama SAR Dalam Negeri	190.000.000	95.000.000	95.000.000	35.000.000	130.000.000
			171.0C	Penyusunan Dokumen Kerjasama SAR	246.296.000	123.148.000	123.148.000	83.148.000	206.296.000
			171.0D	Penyusunan Juknis tentang Kerja Sama	169.000.000	84.500.000	84.500.000	20.000.000	104.500.000
	AEC.002	Kerja Sama Luar Negeri			1.274.704.000	737.352.000	537.352.000	530.529.000	1.067.881.000
		172	Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri		1.274.704.000	737.352.000	537.352.000	530.529.000	1.067.881.000
			172.0A	Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Luar Negeri	459.322.000	229.661.000	229.661.000	229.661.000	459.322.000

				172.0B	Workshop Kerjasama SAR Luar Negeri	815.382.000	507.691.000	307.691.000	300.868.000	608.559.000
			EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.499.995.000	824.998.000	674.997.000	487.108.000	1.162.105.000
			EBA.957		Layanan Hukum	1.311.545.000	721.350.000	590.195.000	383.460.000	973.655.000
			171		Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	1.222.545.000	672.400.000	550.145.000	383.460.000	933.605.000
				171.0A	Penyusunan Peraturan Perundangan	309.277.000	170.102.000	139.175.000	143.600.000	282.775.000
				171.0B	Harmonisasi Peraturan Perundangan	220.600.000	121.330.000	99.270.000	101.600.000	200.870.000
				171.0C	Penelaahan Bidang Hukum	111.200.000	61.160.000	50.040.000	22.160.000	72.200.000
				171.0D	Reviu dan Evaluasi Peraturan Perundangan	108.200.000	59.510.000	48.690.000	0	48.690.000
				171.0E	Penyebarluasan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	140.968.000	77.532.000	63.436.000	27.200.000	90.636.000
				171.0F	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang- undangan	166.150.000	91.383.000	74.767.000	0	74.767.000
				171.0G	Bimbingan Teknis Legal Opinion	166.150.000	91.383.000	74.767.000	88.900.000	163.667.000

			172	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	89.000.000	48.950.000	40.050.000	0	40.050.000
			172.0A	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	89.000.000	48.950.000	40.050.000	0	40.050.000
		EBA.969		Layanan Bantuan Hukum	188.450.000	103.648.000	84.802.000	103.648.000	188.450.000
			052	Pelaksanaan Bantuan Hukum	188.450.000	103.648.000	84.802.000	103.648.000	188.450.000
			052.0A	Koordinasi Advokasi dan Pendampingan Hukum	188.450.000	103.648.000	84.802.000	103.648.000	188.450.000

Tabel 18 Revisi Anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama

Adapun penyerapan anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama adalah sebagai berikut:

Uraian			Pagu Revisi	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
WA.6933 Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama			2.980.782.000	2.932.562.897	98,38 %	48.219.103
AE C	Kerja sama		1.818.677.000	1.807.309.695	99,37 %	11.367.305
AEC.0 01	Kerja Sama Dalam Negeri		800.796.000	800.555.545	99,97 %	240.455
171	Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri		800.796.000	800.555.545	99,97 %	240.455
171.0A	Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Dalam Negeri		160.000.000	159.999.343	100,00 %	657
171.0B	Workshop Kerjasama SAR Dalam Negeri		125.324.000	125.322.872	100,00 %	1.128
171.0C	Penyusunan Dokumen Kerjasama SAR		475.972.000	475.945.368	99,99 %	26.632
171.0D	Penyusunan Juknis tentang Kerja Sama		39.500.000	39.287.962	99,46 %	212.038
AEC.0 02	Kerja Sama Luar Negeri		1.017.881.000	1.006.754.150	98,91 %	11.126.850
172	Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri		1.017.881.000	1.006.754.150	98,91 %	11.126.850
172.0A	Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Luar Negeri		405.897.000	395.345.467	97,40 %	10.551.533
172.0B	Workshop Kerjasama SAR Luar Negeri		611.984.000	611.408.683	99,91 %	575.317
EB A	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1.162.105.000	1.125.253.202	96,83 %	36.851.798
EBA.9 57	Layanan Hukum		973.655.000	948.584.409	97,43 %	25.070.591
171	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		929.105.000	904.388.309	97,34 %	24.716.691
171.0A	Penyusunan Peraturan Perundangan		317.542.000	304.810.482	95,99 %	12.731.518
171.0B	Harmonisasi Peraturan Perundangan		275.637.000	273.750.155	99,32 %	1.886.845
171.0C	Penelaahan Bidang Hukum		50.040.000	49.948.890	99,82 %	91.110
171.0D	Reviu dan Evaluasi Peraturan Perundangan		137.590.000	128.392.685	93,32 %	9.197.315
171.0E	Penyebarluasan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		148.296.000	147.486.097	99,45 %	809.903
172	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		44.550.000	44.196.100	99,21 %	353.900
172.0A	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum		44.550.000	44.196.100	99,21 %	353.900
EBA.9 69	Layanan Bantuan Hukum		188.450.000	176.668.793	93,75 %	11.781.207
052	Pelaksanaan Bantuan Hukum		188.450.000	176.668.793	93,75 %	11.781.207
052.0A	Koordinasi Advokasi dan Pendampingan Hukum		188.450.000	176.668.793	93,75 %	11.781.207

Tabel 19 Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar, capaian kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama telah tercapai 100% melebihi target yang ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Laporan Kinerja ini sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

B. Penghargaan

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) tahun 2023 adalah 86.69 dengan kategori A (SANGAT BAIK). Lampiran di bawah

LAMPIRAN

Lampiran I

Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iwan Rosyadi
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Abdul Haris Achadi
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Abdul Haris Achadi
Pembina Utama Madya (IV/d)

Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama

Iwan Rosyadi
Pembina Tk. I (IV/b)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	80%
		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	4
2.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	80%
		Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	80%

Pagu Anggaran

: Rp. 2.980.782.000,-

Sekretaris Utama



Abdul Haris Achadi
Pembina Utama Madya (IV/d)

Jakarta, Januari 2023
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



Iwan Rosyadi
Pembina Tk. I (IV/b)

Lampiran 2

Hasil Indeks Reformasi Hukum



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2525015 , Faksimili : (021) 2526438
Laman : www.balitbangham.go.id

Nomor : PPH-LT.01.02-77 27 November 2023
Sifat : Penting
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023

Yth. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia
di tempat

1. Rujukan

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.03.01 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 tentang Tim Penilai Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP);
- Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP);
- Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) tahun 2023 adalah **86.69** dengan kategori **A (SANGAT BAIK)**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	25